

PERKEMBANGAN SEKOLAH PARTIKELIR PAKUALAMAN 1892-1942

RINGKASAN SKRIPSI



**Oleh:
Ninda Purnama Sari
07407141006**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012**

PERKEMBANGAN SEKOLAH PARTIKELIR PAKUALAMAN 1892-1942

OLEH:

NINDA PURNAMA SARI DAN RIRIN DARINI, M. HUM

ABSTRAK

Dengan di berlakukannya Politik Etis oleh Pemerintah Belanda di wilayah Hindia Belanda, sedikit-demi sedikit terdapat perbaikan dalam bidang pendidikan. Sekolah dengan sistem Barat banyak didirikan di wilayah Indonesia terutama di Yogyakarta. Pakualaman juga telah mendirikan tiga buah sekolah partikelir yang menggunakan sistem Barat, ketiga sekolah tersebut, dua di antaranya berada di wilayah Pakualaman yang di Yogyakarta, yang satunya di wilayah Adikarto. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang keadaan geografis, demografis, dan pendidikan di wilayah Pakualaman, beserta sekolah partikelir yang didirikan oleh Pakualaman beserta dampaknya bagi masyarakat.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis melalui studi pustaka. Metode yang digunakan melalui langkah-langkah sebagai berikut. **Pertama**, *heuristik*, pengumpulan sumber-sumber yang menyangkut peristiwa sejarah yang akan di tulis. **Kedua**, *kritik sumber*, yaitu kegiatan meneliti sumber-sumber sejarah baik secara eksternal maupun internal yang meliputi kelayakan sumber tersebut untuk dijadikan data dalam penulisan. **Ketiga**, *interpretasi*, yaitu penafsiran makna yang saling berhubungan dari sumber-sumber sejarah yang diperoleh setelah melakukan kritik intern dan ekstern dari data-data yang berhasil dikumpulkan agar penulisan lebih lengkap dan lebih bersifat obyektif. **Keempat**, *penulisan*, yaitu penulisan dan penyampaian rangkuman sumber-sumber yang diperoleh dalam bentuk karya sejarah.

. Dari kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa daerah Pakualaman meliputi sebagian kecil wilayah Yogyakarta yang berada di timur sungai Code, ditambah dengan kabupaten Brosot yang ada di Adikarto, Kulon Progo. Pakualaman mempunyai cukup padat penduduk dengan penduduk yang banyak bermatapencarian dibidang pertanian. Perkembangan pendidikan di Pakualaman dapat dilihat dengan didirikannya tiga sekolah partikelir oleh Pakualaman. Sekolah tersebut dinamakan sekolah Surjengyuritan Lor, Padmosekarnan dan sekolah Ongko Loro. Sekolah Ongko Loro yang didirikan di Adikarto khusus disediakan untuk anak-anak dari para pegawai Pakualaman.

Kata Kunci: Sekolah, Partikelir, Pakualaman

A. Pendahuluan

Pada akhir abad ke-19, mulai muncul perhatian terhadap orang pribumi. Politik kolonial Belanda berkembang menuju gagasan yang menyatakan bahwa politik kolonial tidak boleh lagi hanya bersandar sepenuhnya pada prinsip-prinsip ekonomi liberal. Pada awal abad ke-19, kebijakan Pemerintah Belanda pun mulai berubah.¹ Eksploitasi terhadap Indonesia mulai berkurang. Kebijakan ini kemudian dinamakan sebagai “politik etis”² dan pertama kali dikemukakan oleh Van Deventer melalui majalah *De Gids*³ dalam artikel berjudul “Een Eereschuld”.⁴ Indonesia mengalami perubahan dalam bidang pendidikan setelah dilaksanakannya politik etis pada awal abad ke-19 oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Politik ini pada kenyataannya memang telah memunculkan banyak kemajuan karena Pemerintah Hindia Belanda tidak dapat menghalangi hak bangsa Indonesia untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan.⁵ Pemerintah kolonial pun mulai mendirikan sekolah-sekolah di bumi Nusantara.

Kebijakan politik etis mulai diberlakukan di beberapa wilayah Indonesia, terutama di Jawa. Hal ini karena Jawa merupakan pusat dari wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, terutama di kawasan ibu kota kerajaan dan sekitarnya.

¹ Djumhur, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung : CV ILMU, 1994), hlm. 135.

² Lihat Lampiran Nomer 01, hlm. 98.

³ Majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah Belanda di wilayah Belanda, yang dalam salah satu artikelnya memuat sikap dari Pemerintah Kolonial Belanda yang dianggap tidak mempunyai rasa kemanusiaan.

⁴ Hutang kehormatan Pemerintah Kolonial Belanda kepada Indonesia karena dengan menjajah bangsa Indoonesia, Belanda telah mendapatkan banyak keuntungan. Sudah seharusnya pemerintah kolonial Belanda membalasnya dengan perlakuan baik, dan bukan justru malah selalu menyiksa mereka (masyarakat Indonesia)

⁵ Amir Sutaarga, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, (Jakarta : yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm.176.

Pengembangan pendidikan itu juga tidak bisa dilepaskan dari peran serta dari para kaum cendekia yang masih peduli dengan nasib pendidikan di Indonesia. Mereka membuka sekolah-sekolah rakyat untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia.⁶ Perkembangan pendidikan dan pengajaran sampai akhir abad ke-19 menunjukkan kecenderungan yang dipengaruhi oleh politik pendidikan pada khususnya dan politik kebudayaan pada umumnya.⁷ Hal ini disebabkan oleh:

- a. Sesuai dengan aliran liberalisme yang masih sangat kuat pengaruhnya di Nederland, pengajaran yang diselenggarakan oleh *gubernemen* harus bersifat netral. Ini artinya pengajaran tidak didasarkan atas aliran agama tertentu sehingga pengajaran agama tidak diberikan.
- b. Politik bahasa yang ditempuh juga lebih memperhatikan prinsip kebudayaan dan kesukarelaan, yaitu dalam penyelenggaraan pelajaran bahasa Belanda dalam rangka menanggapi minat besar terhadap penguasaan bahasa ini di kalangan pribumi, terutama di lingkungan aristokrasi. Hal ini tampak pada keengganan pemerintah kolonial untuk memasukkan mata pelajaran bahasa Belanda dalam kurikulum sekolah.
- c. Sejak semula, pembukaan sekolah-sekolah lebih banyak didorong oleh kebutuhan praktis yang berhubungan dengan pekerjaan di berbagai bidang atau dalam berbagai kejuruan.

⁶Sutedjo Bradjanagara, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Jogjakarta : Kongres Pendidikan Indonesia, 1956), hlm. 65.

⁷ Politik Pendidikan dan Politik Kebudayaan merupakan suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah yang mempengaruhi bidang pendidikan dan kebudayaan masyarakat. Seperti mulai bermunculan sekolah yang didirikan pemerintah dengan sistm Barat dan banyaknya masyarakat yang kebudayaannya mulai terpengaruh dengan kebudayaan yang kebarat-baratan, (Suryosubroto, *Beberapa Aspek Dasar-dasar Kependidikan*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1982.), hlm. 39).

- d. Ada gagasan kuat agar sekolah pribumi lebih berakar pada lingkungan kebudayaannya sendiri, maka bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa daerah masing-masing.⁸

Perkembangan pengajaran dengan sistem sekolahnya, mau tidak mau, harus disesuaikan dengan sifat dualistis masyarakat Indonesia pada masa itu.⁹ Hal ini mencakup juga pada bahasa pengantar yang digunakan maupun sistem pengajaran yang dipakai.¹⁰ Pada masa itu, terdapat empat kategori sekolah:

1. Sekolah Eropa, yang sepenuhnya memakai model sekolah di Negeri Belanda.
2. Sekolah bagi pribumi yang memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya.
3. Sekolah bagi pribumi yang memakai bahasa daerah atau pribumi sebagai bahasa pengantarnya.
4. Sekolah yang memakai sistem pribumi.¹¹

Keluarga Pakualaman juga menunjukkan kepedulian terhadap kekurangan sekolah yang ada. Awalnya, putra-putri kerabat Pakualaman dikirim ke sekolah di Solo yang dilanjutkan hingga ke Perguruan Tinggi di Eropa, yang menggunakan sistem pendidikan Eropa. Setelah para putra-putri dari Pakualaman yang telah menempuh pendidikan hingga ke luar negeri itu kembali, mereka kemudian berinisiatif untuk mendirikan sekolah partikelir di wilayah Pakualaman.¹² Semua

⁸ Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 (Dari Emporium Sampai Imperium)*. (Jakarta: Gramedia. 1987), hlm. 353.

⁹Djumhur, *loc.cit.*,

¹⁰Sistem Sekolah Jaman Hindia Belanda lihat lampiran Nomer 02, hlm. 99.

¹¹Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional*, (Jakarta : PT Gramedia, 1990), hlm. 76

¹²Kata partikelir berasal dari kata “private” yang berarti berdiri sendiri tanpa bantuan pihak lain. Sekolah Partikelir merupakan sekolah yang didirikan oleh suatu lembaga atau yayasan yang seluruhnya bukan tanggungan dari pemerintah. Biasanya

kebutuhan sekolah tersebut dibiayai oleh pihak Pakualaman, walaupun dalam perkembangannya pemerintah kolonial mulai ikut campur dalam masalah biaya untuk sekolah ini.¹³ Sekolah tersebut dinamakan Surjengdjuritan Lor yang terletak di dalam wilayah Pakualaman di pendopo Kanjeng Pangeran Surjurud, dan sekolah partikelir yang dinamakan Padmosekarnan yang berada di dalam perkampungan Gunung Ketur. Selain yang ada di wilayah dalam kota Pakualaman, juga terdapat sekolah partikelir yang ada di luar kota Pakualaman, yaitu yang ada di wilayah Adikarto. Sekolah tersebut dinamakan sekolah Ongko Loro, sekolah yang dipersiapkan untuk anak-anak dari pegawai Pakualaman.¹⁴

B. Metode Penelitian

Dalam rangka menguji dan mengkaji kebenaran rekonstruksi sejarah yang sudah ada dan peninggalannya, maka sebuah penelitian harus dilakukan dengan analisa kritis. Analisa itu sendiri terdiri dari:

1. Heuristik

Heuristik merupakan suatu langkah dalam penelitian sejarah, seorang peneliti sejarah harus mengumpulkan sumber-sumber, bahan-bahan, dan arsip-arsip sejarah yang berhubungan dengan peristiwa sejarah yang akan diteliti. Penulis berusaha mencari sumber-sumber arsip yang berupa dokumen dan data-data yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini. Pencarian tersebut dilakukan di ruang arsip milik Pakualaman dan ruang arsip

sekolah tersebut muncul karena kurangnya sekolah-sekolah yang disediakan oleh pemerintah untuk anak-anak pribumi. Selain dapat menambah jumlah sekolah yang ada, sekolah partikelir juga mampu meningkatkan pendidikan di masyarakat, yang tentu saja dapat mengurangi angka buta huruf.

¹³Moch. Tauchid, *Perguruan Partikelir*, (Yogya : Majelis Luhur Persatuan Tamsis, 1955), hlm. 09.

¹⁴Kota Jogjakarta 200 tahun 07 Oktober 1756 - 07 Oktober 1956, Kota Praja Jogjakarta, hlm. 72.

yang terdapat di dalam perpustakaan museum Sonobudoyo. Sumber dalam heuristik itu sendiri terdiri dari;

- a. Sumber Primer, merupakan suatu dokumen atau sumber informasi lain yang diciptakan pada waktu atau di sekitar waktu peristiwa sejarah yang akan di teliti tersebut terjadi.

Arsip Puro Paku-Alaman No. 2130. Berisi peraturan pengawasan sekolah partikelir tahun 1934

Arsip Puro Paku-Alaman No 2140. Berisi tentang pendirian sekolah tahun 1928

Arsip Puro Paku-Alaman No. 2153. Berisi tentang penyediaan alat-alat yang digunakan di sekolah untuk proses belajar mengajar.

Arsip Puro Paku-Alaman No. 2304. Berisi tentang keadaan pendidikan di Paku-Alaman dan kawontenan abdi dalem

Arsip Puro Paku-Alaman No. 2323. Berisi tentang pengawasan sekolah, subsidi, pendirian, penyediaan buku, dan perbatasan jumlah buku

- b. Sumber Sekunder, merupakan suatu bentuk informasi yang berbentuk karya sejarah yang ditulis berdasarkan pada sumber-sumber primer dan biasanya merujuk ke sumber lainnya. Sumber sekunder ideal biasanya mengandung laporan peristiwa di masa lampau berikut generalisasi, analisis, sintetis, interpretasi, dan atau evaluasi terhadap peristiwa itu sendiri. Sumber sekunder terdiri dari :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Balai pustaka. 1986.

Mochammad Tauchid. *Perguruan Partikelir*. Yogya: Majelis Luhur Persatuan Tamsis. 1955

Sri Sutjainingsih. *Sejarah Pendidikan DIY*. Yogya: Departemen Pendidikan dan kebudayaan. 1981.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber merupakan suatu kegiatan analisis terhadap sumber sejarah setelah peneliti melakukan kegiatan heuristik. Langkah ini dinilai sangat penting dan harus dilakukan oleh para sejarawan terhadap dokumen-dokumen setelah mengumpulkan informasi-informasi dari arsip-arsip yang di dapat.

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern dilakukan pada keadaan luar yang tampak pada arsip yang telah ditemukan. Apakah arsip tersebut sesuai dengan waktu peristiwa terjadi bisa dikaji ulang. Dari arsip yang ditemui, kertas dari arsip tersebut sudah usang dimakan waktu dan berbahasa Belanda. Melihat dari kondisi fisik arsip seperti dari keadaan kertas, bahasa dan penulisannya, penulis mencoba mencocokkan dengan tahun atau masa arsip tersebut diterbitkan sudah relevan atau belum.

b. Kritik Intern

Kritik intern adalah suatu cara untuk menilai bagaimana isi dari sebuah arsip yang ditemukan. Apakah isi dari arsip tersebut layak untuk dipakai sebagai sumber dalam penulisan ini. Penulis berusaha untuk mencocokkan isi dari arsip-arsip yang ditemukan dengan sumber arsip lainnya ataupun dengan sumber terbitan (buku).

3. Interpretasi

Interpretasi dapat diartikan sebagai penafsiran. Penafsiran ini sendiri dilakukan terhadap sumber-sumber yang ditemukan. Dalam melakukan penafsiran, seorang peneliti sejarah harus melakukan analisis sesuai dengan fokus penelitiannya. Dengan adanya penafsiran ini, diharapkan penulisan sejarah akan lebih bersifat objektif dalam batas keilmiahannya.

4. Historiografi

Historiografi merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh dalam suatu penelitian sejarah. Historiografi itu sendiri dimaksudkan sebagai langkah penulisan hasil yang didapat seorang peneliti sejarah dalam atau selama melakukan penelitian sejarah. Setelah mengumpulkan sumber-sumber yang memadai yang terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder, dilakukan kritik sumber terhadap sumber-sumber yang diperoleh yang bertujuan sebagai tes uji kebenaran terhadap sumber-sumber itu sendiri. Setelah melakukan kritik sumber, selanjutnya dilakukan interpretasi sejarah. Hal ini bertujuan agar penulis lebih objektif dalam menuliskan karya-karyanya. Setelah semuanya dilakukan, satu hal vital yang harus dilakukan seorang sejarawan adalah menulis hasil penelitiannya dalam bentuk karya sejarah dengan menerapkan metodologi yang ada.

C. Perkembangan Sekolah Partikelir Pakualaman 1892-1942

1. Keadaan Geografi, Demografi dan Pendidikan Pakualaman

Kadipaten Pakualaman adalah salah satu dari empat Kerajaan Jawa (*Praja Kejawen*), yang keempat kerajaan itu sama-sama berasal dari sebuah kerajaan yang pernah berjaya di hampir seluruh pulau Jawa dan sebagian di pulau Kalimantan, yaitu Mataram Islam.¹⁵ Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 menjadikan wilayah Mataram terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Pada tahun 1757 wilayah kekuasaan Susuhunan Surakarta dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Surakarta (Solo) dan Mangkunegaran. Sementara itu,

¹⁵ Ilmi Albilahdiyah, *Puro Pakualaman Selayang Pandang*, (Yogyakarta : DEPDIBUD, 1984), hlm. 22

Yogyakarta juga telah terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Kasultanan¹⁶ Yogyakarta dan Pakualaman.¹⁷ Keempat *Vorstenlanden*¹⁸ itu masing-masing dipimpin oleh penguasa *vorstenlanden* itu sendiri, yaitu Sultan, Sunan dan Adipati.¹⁹ Pakualaman merupakan yang termuda dari keempat keraton yang berada di Jawa Tengah. Wilayah Pakualaman²⁰ sendiri terdiri dari Kabupaten Brosot ditambah sebagian kecil wilayah Ibukota Yogyakarta, yaitu di daerah yang terletak di timur sungai Code yang menjadi tempat kediaman Sri Paku Alam I yang dijadikan pusat pemerintahan bagi daerah Pakualaman atau sering disebut dengan Puro Pakualaman. Sedangkan kabupaten Brosot sendiri terdiri dari empat distrik yaitu Galur, Tawangrejo, Tawangsoaka, dan Tawangkarto.²¹

Wilayah Pakualaman terdiri dari wilayah yang berdekatan dengan Ibukota Yogyakarta dan sebagian wilayah kecil yang ada di Kabupaten Kulon Progo yang berpenduduk cukup padat. Perekonomian masyarakat sendiri cukup beragam. Pada

¹⁶Kasultanan merupakan suatu daerah yang diperintah oleh seorang raja yang sering disebut dengan “Sultan”, (Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2005), hlm. 502).

¹⁷Abdurrahman Surjomiharjo, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe (Sejarah Sosial 1880-1930)*, (Jakarta : Komunitas Bambu, 2008), hlm. 19.

¹⁸ Vorstenlanden merupakan suatu istilah atau sebutan dalam bahasa Belanda untuk suatu daerah yang dikuasai oleh raja, (Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: PT Lestari Perkasa, 2006), hlm. 772

¹⁹Adipati adalah suatu gelar untuk raja muda atau wakil raja yang biasanya digunakan di lingkungan kerajaan Pakualaman dan mangkunegaraan, (Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2005), hlm. 16.

²⁰Peta daerah-daerah yang termasuk wilayah Pakualaman dapat dilihat di lampiran nomer 06, hlm. 107.

²¹Abdurrahman Surjomiharjo, *op.cit*, hlm. 20.

awal abad ke-19 konsekuensi tertentu dari pengaruh Barat mulai tampak jelas.²² Dalam bidang ekonomi akibat yang paling menonjol adalah meningkatnya jumlah penduduk dan diperkenalkannya ekonomi uang.²³ Hal ini dikarenakan banyaknya pabrik gula yang didirikan oleh pihak asing yang menggunakan tenaga kerja dari orang pribumi.

Dengan demikian, membuat uang berputar di lingkungan penduduk dalam bentuk upah yang diberikan untuk para tenaga kerja pribumi yang bekerja di pabrik milik orang asing.²⁴ Perkembangan ini semakin cepat selama fase kebijakan ekonomi yang sering disebut dengan periode Liberal dari tahun 1870-1900. Periode inilah tanaman tebu, kopi, teh dan kina mulai dikembangkan diperkebunan wilayah Kulon Progo, perusahaan-perusahaan swasta dapat menyewa sawah-sawah yang beririgasi dari pemilik bangsa Indonesia untuk penanaman tebu secara bergantian dengan penanaman padi oleh penduduk pribumi.²⁵ Proses ini membuat semakin melemahnya kepemilikan tanah penduduk pribumi, karena lahan ini menjadi penting bagi penanam tebu yang memandang desa sebagai perusahaan umum yang memiliki lahan atas dasar komunal sehingga mereka merasa diwajibkan berbicara hanya dengan pemimpin desa, bukan dengan para pemilik secara individual. Para petani memperoleh pendapatan dalam bentuk sewa yang dibayar oleh pemilik perkebunan

²²W. J. Wertheim, *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi*, (Yogyakarta : Tiara wacana, 1990), hlm.65.

²³Ekonomi uang merupakan suatu sistem perekonomian yang mulai memberlakukan dan menggunakan uang sebagai alat untuk proses jual beli yang menggantikan pertukaran barang pada sistem perekonomian sebelumnya (Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perkebunan di Nusantara : Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1991), hlm. 03.

²⁴W. F. Wertheim, *loc.cit.*

²⁵ Abdurachman, *op,cit.*, hlm 69.

dan mereka dapat pula memperoleh hasil lebih di perkebunan sebagai kerja harian atau musiman.

Sistem Tanam Paksa telah menjadikan masyarakat pribumi terbiasa menjadi tenaga kuli di bawah pengawasan orang Barat. Ekonomi subsistensi²⁶ untuk memenuhi kebutuhannya sendiri di hapuskan secara *progresif*²⁷, meskipun demikian masyarakat Pakualaman tetap ingin mempertahankan ikatan dengan tanahnya tersebut. Hasilnya para petani mempertahankan sikap pasif terhadap serbuan ekonomi uang. Mereka bertahan sebagai petani yang memenuhi kebutuhannya sendiri, mencari pendapatan lain jika dibutuhkan, dan mencoba mencari sedikit tambahan jika kondisi sama sekali tidak bekerja namun tetap dipekerjakan oleh suatu usaha milik Barat. Mereka lebih senang memberikan keuntungan kepada Cina atau orang Arab, karena mereka dianggap sudah sejak lama telah menguasai lingkungan tradisional pedesaan.²⁸

²⁶Ekonomi Subsistensi merupakan suatu perekonomian yang didalamnya merupakan suatu usaha yang menghasilkan barang-barang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mereka sendiri, (Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perkebunan di Nusantara : Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1991), hlm. 04.

²⁷Progresif merupakan istilah untuk menggambarkan suatu perubahan yang dapat mengarah ke suatu kemajuan, yang digambarkan pada kemajuan masyarakat setelah di kenalkan dengan pendidikan Barat, (Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2005), hlm 374).

²⁸ Bangsa Arab dan Cina lebih dulu masuk ke Indonesia bila dibandingkan dengan bangsa Belanda. Bangsa Arab dan Cina telah berhasil mendekatkan diri mereka pada masyarakat terutama masyarakat tradisional pedesaan.

Kontak pertama dengan dunia Barat dilakukan, daerah-daerah di Pakualaman merupakan area pertanian, yang kebanyakan mereka menanam padi di persawahan mereka.²⁹ Ada pula penduduk yang mempraktikkan sistem “ladang berpindah”³⁰ di area hutan yang mereka bersihkan dengan cara membakarnya kemudian mereka menjadikan area tersebut sebagai lahan tanam mereka. Bentuk ekonomi yang dianut masyarakat bisa dikatakan tertutup,³¹ para petani biasanya menggunakan hasil-hasil tanaman di ladang mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Selain itu, ada sejumlah pertukaran produk dan tenaga kerja tertentu yang banyak di jumpai di desa-desa, yang pada umumnya berdasarkan prinsip komunal, tradisional dan non-komersional. Perdagangan eksternal tidak begitu diminati oleh pemerintah, pada umumnya pemerintah lebih senang menarik pajak dari masyarakat yang dilakukan secara paksa yang kemudian dalam perkembangannya telah berhasil dihapuskan oleh Raffles. Dampak pemerintah pada kehidupan desa, telah melebihi pengaruh yang diberikan oleh penguasa pribumi, yang dalam wilayah luas membiarkan ekonomi desa dalam keadaan utuh. Pemilikan swasta atas sawah muncul, hak-hak orang desa dipersempit dan kekuasaan pemimpin desa untuk mengatur lahan yang dapat

²⁹W. F. Wertheim, *op,cit.* hlm.65

³⁰ Ladang berpindah adalah penggunaan ladang yang ada di hutan dengan membersihkan ladang tersebut terlebih dahulu setelah itu baru bisa ditanami, setelah ladang tersebut dianggap sudah tidak produktif lagi, mereka akan berpindah mencari tempat (lahan) untuk dijadikan ladang baru yang lebih produktif, (Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perkebunan di Nusantara : Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1991), hlm. 03

³¹Ekonomi tertutup adalah perekonomian yang menggunakan hasil dari lahan mereka (petani) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terpengaruh dengan kebudayaan perekonomian lainnya seperti ekonomi uang, mereka juga masih menggunakan sistem tukar menukar barang, menggunakan suatu barang sebagai alat pengganti uang, (Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perkebunan di Nusantara : Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1991), hlm. 03.

ditanami semakin tinggi. Dengan banyaknya kedatangan bangsa asing, terutama bangsa Cina telah sedikit demi sedikit menggeser pertanian masyarakat Yogyakarta.

Mata pencaharian pokok penduduk Pakualaman adalah bercocok tanam, walaupun mereka mempunyai ladang atau areal pertanian yang dapat mereka kerjakan sebagai mata pencaharian pokok mereka, namun mereka juga tetap mempunyai mata pencaharian di bidang lain seperti menjadi pedagang, tukang kayu, pengrajin bambu, pengrajin batik dan tekstil. Perkembangan yang pesat pada industri batik dan tekstil dipengaruhi oleh banyaknya penduduk asing yang masuk dan tinggal di wilayah mereka dan mendirikan industri-industri batik dan tekstil. Tumbuhnya industri tersebut tentu membuka peluang lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat Pakualaman. Masyarakat sendiri lebih tertarik untuk menjadi buruh pabrik yang pekerjaannya lebih mudah bila dibandingkan dengan bercocok tanam, selain itu upah yang mereka dapatkan juga lebih besar bila dibandingkan dengan hasil dari tanaman mereka di ladang.

Dalam perkembangan selanjutnya, mata pencaharian menjadi masyarakat sebagai petani sudah mulai berkurang. Penduduk sudah mulai beralih pekerjaannya sebagai pedagang atau buruh pabrik tekstil yang banyak didirikan oleh bangsa Cina. Berkurangnya jumlah penduduk yang pekerjaannya sehari-hari menjadi petani dapat dibuktikan dengan berkurangnya perbandingan jumlah hewan ternak yang berfungsi sebagai alat bantu dalam membajak sawah dan alat transportasi.

Sebelum pendidikan Barat masuk, Pakualaman telah mengenal pendidikan Islam dan tradisional. Pengajaran diadakan setelah sholat maghrib di langgar hingga waktu sholat Isya tiba. Pendidikan agama Islam diajarkan pertama kalinya dalam lingkungan keluarga. Ayah dan ibu bertindak sebagai guru bagi anak-anaknya. Ayah dan ibu memberikan pendidikan akhlak berupa cerita atau kisah orang-orang saleh atau cerita tentang sejarah nabi, yang biasanya diberikan sebelum tidur atau pada waktu berkumpul dengan keluarga. Tidak jarang juga para orang tua memberikan hafalan bacaan ayat-ayat Al Quran atau doa-doa serta menuntun praktek ibadah shalat dengan cara mengajak anak-anaknya untuk turut shalat berjamaah dengan ayah di rumah atau

di langgar atau masjid. Pendidikan semacam demikian umumnya dilaksanakan oleh keluarga-keluarga muslim walaupun cara atau materinya bervariasi.³²

2. Sekolah Partiekliir di Pakualaman

Pakualaman merupakan suatu pusat Pemerintahan yang baru di Yogyakarta, sudah tentu Pemerintahan yang baru itu harus mengangkat alat Pemerintah yang serba baru juga.³³ Karena belum banyak orang-orang yang pantas untuk dipercaya memegang dan bertanggungjawab atas Negara, maka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku-Alam I sendiri memberikan pelajaran segala sesuatu pengetahuan dan ilmu tata-negara kepada para putra dan santana. Adapun yang ikut serta dan menjalani usaha K. G. P. A. A. Paku-Alam I, yaitu³⁴:

1. Seorang pegawai bernama Ngabei Kawiredjo, ia memberikan pelajaran tentang kesusastraan Jawa.
2. Seorang Penghulu bernama Kyai haji Mustahal, memberikan pelajaran ilmu agama Islam.

Dalam waktu yang singkat Kadipaten Pakualaman dapat melengkapi pegawai yang cukup cakap untuk dapat menjalankan pemerintahan pada saat itu. Sistem yang diusahakan K. G. P. A. A. Paku-Alam I tersebut menjadi suatu teladan bagi para putera-santana dan para pegawai, dan sistem ini dapat berjalan terus dalam lingkungan Pakualaman. Pada masa K.G.P.A.A Paku Alam II perkembangan dan kemajuannya dapat menunjukkan hasil yang memuaskan. Salah satu hasil dari sistem

³²Direktorat Syariah dan Nilai Tradisional Proyek Investasi dan Dokumentasi, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Sebelum Kedatangan Bangsa-bangsa Barat*, (Jakarta : DEPDIBUD, 1991), hlm. 49.

³³ Djoko Dwiyanto, *Puro Pakualaman : Sejarah, Kontribusi dan Nilai Kejuangan*, (Yogyakarta : Paradigma Indonesia, 2009), hlm.10.

³⁴ Kota Jogjakarta 200 Tahun, *op.cit*, hlm. 65.

tersebut adalah para putra Santana dapat menjabat pangkat tentara (*Legioen*) yang lebih tinggi, yang sederajat dengan tentara bangsa Belanda pada saat itu.³⁵

Pada akhir abad ke 19, kira-kira 1892 *Legioen* (tentara) dibubarkan oleh pemerintah Hindia-Belanda. Karena pembubaran *Legioen* ini, maka dari kebijakan K.G.P.A.A Paku-Alam V berusaha, agar para putera-santana Pakualaman dapat diterima menjadi murid pada sekolah-sekolah Belanda, yang dilanjutkan di sekolah H. B. S di Jakarta, kemudian selanjutnya ke Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Bagi anak-anak Pegawai Pakualaman disediakan sebuah sekolah partikelir, yang setingkat dengan sekolah Gubernemen yang ada diluar daerah Yogyakarta. Sekolah tersebut dibawah pimpinan Ngabei Wirohaksoro sebagai Kepala Sekolah. Selain sekolah tersebut ada beberapa sekolah partikelir lagi yang sengaja disediakan untuk anak-anak rakyat dalam daerah Pakualaman. Sekolah-sekolah partikelir yang ada dalam daerah Kadipaten Pakualaman yaitu;³⁶

- a. Sekolah Surjengyuritan Lor yang tempatnya berada di pendopo Kanjeng Pangeran Surjaningyurut, putra nomer empat dari K.G.P.A.A Paku Alam I. Tepatnya sekolah ini ada di jalan Purwanggan Wetan berada di sebelah selatan jalan yang sekarang ini termasuk cepuri Pura Pakualaman bagian belakang. Dari Surjengyuritan Lor berpindah tempat dirumah R. Panji Suraminarso, yang sekarang ada di depan Puro Pakualaman sebelah timur, dan bertempat disebelah jalan Jayaningprangan. Perkembangan selanjutnya sekolah ini di pindah lagi ke

³⁵ Ryadi Goenawan, *Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Jakarta : DEPDIBUD, 1993), hlm. 93.

³⁶ Kota Jogjakarta 200 Tahun, *op.cit*, hlm. 72.

dalam, yaitu di Bangsal panjang, sebelah Tenggara Bangsal Sewa Taman (pendopo Puro Pakualaman) dengan nama sekolah Jero Gede³⁷

- b. Sekolah Padmosekarnan yang berada di kampung Gunungketur dan letak sekolah tersebut ada di sebelah timur jalan Gunungketur. Untuk namanya sendiri, nama tersebut diberikan hanya karena pada saat itu bertepatan dengan masa pemerintahan K.G.P.A.A Paku Alam V. Pada saat itu ada seorang Wedana Reh Reksawibawa merangkap Reh Langenpraja, bernama Ngabei Padmasukarna. Mungkin karena sekolah tersebut ada di kompleks rumah Ngabei Padmosekarna, sekolah tersebut terkenal dengan nama Sekolah Padmosekarnan.

Pendidikan di Adikarto yang masih merupakan wilayah Pakualaman keadaannya tidak jauh berbeda dengan keadaan pendidikan di Pakualaman. Sebelum masyarakat mengenal sistem pendidikan Barat, masyarakat sudah mengenal pendidikan secara tradisional. Seiring dengan masuknya pendidikan Barat di wilayah Adikarto, pendidikan langsung bisa berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bermunculan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Akhir abad 19 masyarakat mulai dikenalkan dengan sekolah dasar yang didirikan pemerintah. Sekolah tersebut adalah sekolah kelas 1, sekolah kelas 2, sekolah Desa, sekolah Lanjutan, sekolah Sambungan, sekolah Pribumi berbahasa Belanda dan kursus Guru Desa.

Sifat dualistis yang dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda tentu sangat berpengaruh bagi perkembangan pendidikan di Adikarto. Sifat dualistis itu sendiri terkait dengan bahasa pengantar dan sistem pengajaran. Untuk sekolah jenis sekolah Eropa berbahasa Belanda dan sekolah pribumi berbahasa Belanda kelak disiapkan untuk fungsi-fungsi dalam sektor-sektor yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengatarnya. Sistem dualistis dalam perkembangannya berdampak sosial yang menjadikan bahasa ini menjadi lambang status di lingkungan masyarakat. Sistem

³⁷ Letak sekolah bisa di lihat di lampiran nomer 07, hlm. 108.

pendidikan yang berkembang di masyarakat terikat dengan sistem dualisme dan plurarisme sosial ekonomi dengan disertai adanya diskriminasi warna kulit.

Beberapa sekolah yang didirikan pemerintah di wilayah Adikarto ternyata belum bisa menampung semua anak di daerah Adikarto yang menginginkan masuk ke sekolah. Hal tersebut mengakibatkan munculnya sekolah liar yang salah satunya didirikan oleh Pakualaman di daerah Pakualaman. Sekolah tersebut jenisnya adalah sekolah partikelir yang sederajat dengan sekolah Ongko Loro yang didirikan pemerintah.³⁸ Sekolah Ongko Loro didirikan bersamaan dengan sekolah partikelir yang ada di Pakulaman, yaitu pada tahun 1892. Sekolah Ongko Loro ini diperuntukkan untuk anak-anak dari pegawai Pakualaman yang tujuannya untuk mempersiapkan lulusannya untuk menjadi carik desa (perangkat desa).

Gedung sekolah Surjengyuritan menggunakan sebuah bangunan yang ada di dalam Puro Pakualaman sedangkan sekolah Padmosekarnan berada di luar Puro namun masih merupakan daerah Pakualaman. Sekolah yang berada di wilayah Adikarto menggunakan rumah salah satu penduduk yang ada disana. Bangunan yang ada berisi barang-barang keperluan belajar mengajar yang cukup lengkap. Walaupun sudah tersedia barang-barang untuk keperluan sekolah, namun barang-barang tersebut masih sangat sederhana sekali. Peralatan yang terdapat di sekolah meliputi beberapa meja pendek namun panjang cukup untuk duduk bersila lima orang anak. Sebuah papan tulis setiap kelas yang lengkap dengan kapur tulisnya. Buku yang masih berupa tulisan tangan asli hanya tersedia untuk pegangan para guru. Semua materi pelajaran di tulis di papan tulis oleh guru, sedangkan murid-murid mempergunakan batu tulis dan anak batu tulis untuk mencatat materi pelajaran yang diberikan guru. Judul buku yang digunakan yaitu : Wulang Reh karangan Paku

³⁸ *Ibid*

Buwana IV,³⁹ Wedatama Wirawijata karangan Mangkunegaran IV,⁴⁰ buku Emboen, karangan dari guru Belanda (G.F. Lavell) dan guru bahasa Melayu (m. Taib), Taman Sari, karangan J. Kats.⁴¹

Sekolah Kelas Dua yang dimaksud sebagai Sekolah Rakyat yang memberi pendidikan sederhana bagi seluruh rakyat. Sekolah ini akan mempersiapkan berbagai macam pegawai rendah untuk kantor pemerintah dan perusahaan swasta, dan tidak jarang pula sekolah ini berfungsi untuk mempersiapkan guru bagi Sekolah Desa. Sekolah ini menjadi lembaga pendidikan bagi golongan elite di kalangan golongan rendah. Sekolah kelas dua hanya memiliki kurikulum yang sederhana, yang meliputi pelajaran membaca, menulis dalam bahasa Melayu dan berhitung. Pelajaran agama dilarang walaupun ruangan kelas dapat digunakan untuk pendidikan agama di luar jam sekolah. Awalnya Sekolah Kelas Dua lama pendidikannya hanya 3 tahun, namun dalam perkembangannya lama pendidikan di tambah 2 tahun, agar kelak dapat mempersiapkan muridnya untuk memasuki Kweekschool (Sekolah Pendidikan Guru). Kurikulumnya juga mulai bertambah dengan diajarkannya pelajaran menggambar, dan pelajaran menyanyi serta ilmu bumi diajarkan di kelas 3. Ilmu alam diberikan di kelas 4 dan 5 dan terutama mengenai pengetahuan yang sederhana tentang tanaman, binatang dan tubuh manusia.⁴²

Para guru terdiri dari Mantri Guru (kepala Sekolah) dengan para guru pembantu. Pada saat itu, para guru di sekolah partikelir dianggap oleh pemerintah sebagai guru yang magang (calon) pegawai negeri dan mudah untuk pindah bekerja di perkebunan

³⁹ Abu Ahmadi, *Sejarah Pendidikan*, (Semarang : CV Toha Putra, 1985), hlm.18.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid*, hlm 66.

⁴² *Ibid.* hlm 62

milik orang asing. Mereka tidak memiliki ijazah khusus untuk mengajar di sekolah ini, walaupun demikian tidak sedikit dari mereka yang berijazah. Karena sekolah ini didirikan dan dalam naungan Pakualaman maka tidak sedikit pula para kerabat Pakualaman yang berperan dalam mengurus sekolah partikelir ini. Para kerabat Pakualaman yang ikut terlibat membawahi para guru dan kepala sekolah sehingga proses perkembangan sekolah ini masih dalam kontrol dan pengawasan dari para kerabat Pakualaman. Gaji bagi guru di sekolah partikelir tergantung dari jumlah penerimaan uang sekolah, namun serendah-rendahnya f 25. Gaji guru tiap bulannya tergantung jumlah penerimaan uang sekolah, tapi serendah-rendahnya f. 25, yang biasanya dibagi untuk beberapa guru.

3. Perkembangan Sekolah Partikelir Pakualaman

Sekolah partikelir Pakualaman berdiri dari tahun 1892, dua diantaranya terdapat di wilayah Pakualaman yang terdapat di daerah Yogyakarta, berdekatan dengan Puro Pakualaman yang menjadi tempat kediaman Paku Alam. Satu sekolah partikelir yang juga didirikan oleh Pakualaman terdapat di daerah Adikarto, Kulon Progo. Awal berdirinya sekolah partikelir Pakualaman ini ternyata belum bisa menarik perhatian masyarakat sekitar, hanya sebagian kecil jumlah masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sekolah partikelir Pakualaman. Hal ini disebabkan anggapan yang berkembang di masyarakat, bahwa sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Belanda lebih baik dibandingkan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pihak swasta. Para masyarakat ingin sekali menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Belanda, namun karena keterbatasan biaya dan fasilitas sekolah yang belum memadai sehingga tidak bisa menampung semua murid yang ingin belajar di sekolah-sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Belanda tersebut.

Sekitar tahun 1900, mulai banyak masyarakat yang tertarik dan mempercayakan anak-anaknya untuk disekolahkan di sekolah partikelir Pakualaman. Hal ini

dikarenakan, mereka melihat lulusan dari sekolah partikelir Pakualaman mendapatkan banyak ilmu dari sekolah partikelir Pakualaman. Lulusan yang dihasilkan sekolah partikelir paling tidak mereka bisa menulis dan membaca huruf abjad dan Jawa, serta dapat menghitung dengan angka. Selain itu biaya yang harus dikeluarkan cukup terjangkau bagi masyarakat, dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan di sekolah Pemerintah Belanda yang jelas lebih mahal. Melihat perkembangan sekolah partikelir yang semakin lama semakin membaik, muncul perhatian dari Pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda takut dalam sekolah tersebut disisipkan materi yang mengandung nilai nasionalisme pada Indonesia, dikhawatirkan nantinya terdapat banyak pemberontak pribumi yang menentang kekuasaan Pemerintah Belanda. Permasalahan tersebut ditanggapi Pemerintah Belanda dengan mengadakan pengawasan bagi sekolah-sekolah partikelir yang ada di Yogyakarta, karena banyak sekolah partikelir yang berdiri selain yang ada di wilayah Pakualaman.

4. Pengawasan Sekolah

Dalam perkembangannya, sekolah partikelir telah mencapai kemajuan yang cukup pesat. Selain mulai munculnya sekolah-sekolah partikelir yang lain, juga meningkatnya jumlah murid yang bersekolah di sekolah partikelir. Hal ini tentu telah menarik perhatian dari pemerintah, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berupa peraturan yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi sekolah-sekolah partikelir yang mulai bermunculan. Kebijakan tersebut berupa ordonasi yang mengatur mulai dari pengajaran, aturan untuk berdirinya sekolah itu sendiri hingga sangsi-sangsi yang diberikan bila terjadi pelanggaran-pelanggaran.

D. Pengaruh Sekolah Partikelir Pakualaman 1892-1942

Sekolah partikelir Pakualaman menyebabkan pengaruh di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, dampak secara jelas dapat di lihat sebagai berikut:

1. Pengaruh di Bidang Sosial

Adanya sekolah partikelir yang ada di Pakualaman tentu saja menambah jumlah anak-anak yang mendapatkan pendidikan di lingkungan sekitar Pakualaman. Walaupun Jumlah sekolah yang ada tidak bisa dijadikan sebagai gambaran bagaimana keadaan pendidikan sebenarnya, karena sekolah tersebut bisa saja muridnya tidak lebih dari sepuluh anak, tetapi jumlah sekolah ini dapat memberi sekedar penunjuk tentang tingkat keterlibatan badan pemerintah dan partikelir lainnya dalam pengajaran gaya Barat. Perubahan sosial di zaman kolonial memang bersifat multi fungsi dan tidak konsisten. Di samping terjadinya proses pembaharuan struktural, juga yang lebih penting yaitu proses pengabdian nilai-nilai. Di samping terjadinya usaha penyesuaian kultural, antara aspirasi-aspirasi tradisional dengan kenyataan politik, muncul pula gerakan penolakan terhadap situasi kolonial tersebut. Penolakan ini dilakukan, baik yang ingin mempercepat proses timbulnya masyarakat yang baru, maupun oleh pihak yang menginginkan kembalinya ketentuan lama. Tetapi dalam suasana seperti ini unsur dinamisasi dalam masyarakat mulai berjalan dan bergerak ke arah tercapainya integrasi yang lebih luas, yang tidak terikat hanya kepada kesetiaan lama mulai lancar.

2. Pengaruh di Bidang Ekonomi

Memperoleh pendidikan walaupun hanya setingkat sekolah rendah, angka pengangguran yang ada di Pakualaman tentu akan berkurang. Bertambahnya jumlah angka masyarakat yang mempunyai pekerjaan yang lebih baik tentu saja akan menaikkan kesejahteraan masyarakat. Pekerjaan baru yang di dapatkan oleh masyarakat tentu pekerjaan yang lebih baik bila diukur dari upah kerja yng di dapat dan pekerjaan yang dikerjakan. Sebelumnya masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan hanya bekerja sebagai petani diladang mereka atau bekerja di ladang orang lain yang tentu saja hanya mendapatkan upah yang sedikit.

Lulusan dari sekolah partikelir Ongko Loro yang di Adikarto dengan menjadi Lurah dan perangkat desa lainnya, tentu akan bisa membantu perekonomian orang tua

mereka. Para guru yang sebelumnya tidak dapat mengajar disekolah karena kurangnya sekolah yang ada, sedangkan mereka lulusan sekolah guru, dengan adanya sekolah ini tentu saja mereka dapat memperoleh pekerjaan mengajar di sekolah partikelir di Pakulaman. Dengan berkembangnya pendidikan masyarakat, terdapat pekerjaan masyarakat yang cukup bervariasi, diantaranya seperti pekerjaan sebagai juru tulis dan mantri, mandor dan opas, petani, pedagang bahkan ada beberapa orang dari golongan masyarakat rendahan bisa menjadi pegawai tinggi.⁴³

Struktur sosial daerah pedesaan sangat berbeda dengan daerah perkotaan. Para pejabat pamong praja beserta anggota stafnya berada di puncak lapisan sosial masyarakat. Mereka umumnya adalah orang-orang yang berasal dari kota dan tetap berorientasi di kota, dan tidak mempunyai minat dengan bidang pertanian dan kehidupan pedesaan. Diantara penduduk tani, kepala desa dan para pembantunya mempunyai status sosial yang tinggi dalam masyarakat. Diluar kelompok pamong desa, stratifikasi sosial di dasarkan pada dasar pemilikan tanah. Yang menempati kedudukan sosial pertama dan tertinggi adalah kuli kenceng, mereka yang memiliki sawah yang bisa diairi, kelas ini juga terdiri dari mereka yang hanya memiliki tanah kering yang mudah ditanami, akan tetapi status mereka berada sedikit di bawah para pemilik tanah sawah. Tingkat sosial berikutnya adalah kuli karangkopek, yang tidak memiliki sawah tetapi hanya pekarangan. Selanjutnya kuli indung atau kuli gandok yang sama sekali tidak memiliki tanah tetapi memiliki rumah di tanah orang lain. Kelas sosial yang terakhir adalah indung tlosor, yang tidak memiliki tanah maupun rumah, menumpang pada keluarga lain dan bekerja pada mereka sebagai imbalannya

⁴³Sartono Kartodirdjo, *op. cit*, hlm. 150.

3. Pengaruh di Bidang Kebudayaan

Pendidikan dan kebudayaan sering diibaratkan sebagai dua sisi dari sekeping mata uang, kalau pendidikan merupakan satu sisi dari keping mata uang tersebut maka kebudayaan merupakan sisi yang lainnya. Begitu pula yang sebaliknya, kalau kebudayaan merupakan satu sisi dari keping mata uang tersebut maka pendidikan merupakan sisi yang lainnya. Perumpamaan tersebut menggambarkan eratnya hubungan atau kaitan di antara pendidikan dengan kebudayaan. Contoh kenyataannya adalah apabila dalam dunia pendidikan terjadi perubahan-perubahan maka hal ini pun secara langsung maupun tak langsung akan terjadi dalam dunia kebudayaan.⁴⁴ Setelah masyarakat banyak mendapatkan pendidikan dengan sistem Barat, terjadi perubahan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat Pakualaman. Selain sifat dan sikap masyarakat yang mulai ke-Barat-baratan, terjadi juga perubahan pandangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Terutama pandangan bagi anak-anak perempuan yang sebelumnya pendidikan dianggap tidak penting bagi anak perempuan. Bagi masyarakat di pandang anak-anak perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan secara formal, karena kelak mereka hanya mengurus anak dan keluarga di rumah, tidak perlu bekerja karena sudah ada suami yang selalu memberi nafkah. Perkembangan pendidikan ini mengubah anggapan tersebut, sudah banyak anak-anak perempuan mulai di amukkan ke sekolah oleh orang tuanya, dengan hrapan kelak anak perempuan juga bisa membantu perekonomian keluarga dengan bekerja, selain yang bisa dilakukan anak laki-laki.

Pandangan pada anak-anak pada umumnya, dulunya orangtua di pedesaan memandang anak-anak mereka sebagai modal tenaga ekonomi yang bisa dimanfaatkan dalam bidang pertanian yang menjadi pekerjaan orangtua mereka. Adanya sekolah dengan sitem Barat ini ternyata telah mengubah semua pandangan mereka, mulai ada pandangan para anak-anak kelak bisa dijadikan sebagai modal

⁴⁴Suparman, Kaitan Kebudayaan dengan Pendidikan, pada [http: //www.google.com/Kebudayaan dan Pendidikan](http://www.google.com/Kebudayaan%20dan%20Pendidikan). Diakses pada tanggal 20 Maret 2012.

ekonomi dengan sekarang membiayai pendidikan mereka terlebih dahulu. Melihat keadaan seperti ini, sudah jelas para orangtua sudah meninggalkan sikap tradisional menyuruh anak-anak mereka membantu pekerjaan orangtuanya dalam bertani tanpa memberikan mereka pendidikan, dan agar kelak anak-anak mereka juga bisa menjadi petani seperti orangtua mereka. Sekarang orangtua memberikan pendidikan anak-anak mereka agar mendapat ketrampilan agar kelak siap bersaing didunia kerja.⁴⁵

E. Kesimpulan

Pakualaman terbentuk dari adanya perjanjian Giyanti antara pihak Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwana III dengan kelompok Pangeran Mangkubumi, yang terdiri dari Pangeran Mangkubumi, Pangeran Wijil, Pangeran Krapyak dan Pangeran Hadiwijoyo. Isi dari perjanjian tersebut adalah wilayah Mataram dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Yogyakarta sendiri dibagi menjadi dua wilayah yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Wilayah Pakualaman meliputi Kabupaten Brosot, yang ada di Kulon Progo, terdiri dari Galur, Tawangrejo, Tawangsoka, Tawangkarto dan di tambah sebagian kecil wilayah Ibukota Yogyakarta, yang terletak di timur sungai Code yang dijadikan pusat pemerintahan Pakualaman. Pengenalan pendidikan di Pakualaman diawali dengan pendidikan dengan sistem tradisional. Biasanya pelajarannya tentang agama yang dapat di praktikan di kehidupan sehari-hari mereka. Dibangunnya beberapa sekolah yang didirikan pemerintah dengan sistem Barat, masyarakat mulai mengenal sistem Barat, terutama untuk keluarga Pakualaman.

Tahun 1891 sudah banyak keluarga Pakualaman yang mulai masuk ke sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan sistem Barat. Mereka juga sempat melanjutkan sekolah mereka dari sekolah dasar sampai ke sekolah tinggi di luar negeri. Setelah mereka lulus, mereka kembali ke Pakualaman dan mendirikan

⁴⁵ Abdurachman Surjomiharjo, *loc. cit.*

sekolah partikelir baik di wilayah Pakualaman yang ada di Yogyakarta dan di Adikarto. Sekolah yang terletak di wilayah Pakualaman yang di Yogyakarta bernama sekolah Surjengdjuritan Lor dan Padmosekarnan, sedangkan sekolah yang ada di Adikarto adalah sekolah Ongko Loro yang khusus disediakan untuk anak-anak dari pegawai Pakualaman yang nantinya dipersiapkan untuk menjadi Lurah dan perangkat desa. Sekolah tersebut terlepas dari campur tangan pemerintah, jadi pihak Pakualaman berhak penuh atas segala urusan yang bersangkutan dengan sekolah tersebut. Dalam perkembangannya, setelah Pemerintah mengetahui sekolah partikelir yang ada dapat berkembang dengan pesat, lalu pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur adanya sekolah partikelir yang mulai banyak bermunculan, salah satunya sekolah yang didirikan Pakualaman. Sejak saat itulah pemerintah mulai mencampuri dan mengawasi sekolah partikelir yang ada di Pakualaman.

Sekolah partikelir yang didirikan Pakualaman baik yang di wilayah Yogyakarta maupun yang di Adikarto, tentu saja sudah membawa banyak dampak dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat Pakualaman. Adanya sekolah ini bisa menambah angka jumlah anak-anak pribumi sekitar Pakualaman yang telah mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan dengan sistem Barat. Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat Pakualaman dengan diperolehnya beberapa keahlian yang didapatkan dari sekolah partikelir tersebut, tentu saja membuka lebar peluang pekerjaan untuk masyarakat, baik itu dari pemerintah Pakualaman sendiri juga banyak dari pemerintah kolonial Belanda.

Lebih terbukanya kesempatan pekerjaan bagi masyarakat Pakualaman tersebut, tentu saja telah mengurangi jumlah pengangguran yang ada di wilayah Pakualaman. Pekerjaan di instansi pemerintah dianggap lebih menjamin kehidupan masyarakat, karena gaji atau upah yang di dapatkan lebih besar bila dibandingkan dengan penghasilan mereka sebelumnya yang hanya menjadi petani. Selain itu, pekerjaan ini juga dapat meningkatkan status seseorang dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Terbitan Resmi

Arsip Puro Paku-Alaman No. 2130. Berisi peraturan pengawasan sekolah partikelir tahun 1934

Arsip Puro Paku-Alaman No 2140. Berisi tentang pendirian sekolah tahun 1928

Arsip Puro Paku-Alaman No. 2153. Berisi tentang penyediaan alat-alat yang digunakan di sekolah untuk proses belajar mengajar

Arsip Puro Paku-Alaman No. 2304. Berisi tentang keadaan pendidikan di Paku-Alaman dan kawontenan abdi dalem

Arsip Puro Paku-Alaman No. 2323. Berisi tentang pengawasan sekolah, subsidi, pendirian, penyediaan buku, dan perbatasan jumlah buku

Buku

Abdurachman Surjomiharjo, *Sejarah Perkembangan Sosial Kota Yogyakarta*, Yogyakarta : Yayasan untuk Indonesia. 2006

_____, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.

Bambang Suwondo, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: DEPDIBUD, 1977.

Baudet, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1987

Breman, *Djawa: Pertumbuhan Penduduk dan Struktur Demografis*, Jakarta: Bhratara, 1971

Burger. D. H, *Perubahan-perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Bhratara, 1977

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

- _____, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- _____, *Sejarah daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Depdikbud, 1997.
- Djoko Dwiyanto, *Puro Pakualaman: Sejarah, Kontribusi dan Nilai Kejuangan*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009.
- Djumhur. I, *Sejarah Pendidikan*, Bandung: CV Ilmu, 1970.
- Helius Syamsudin, *Metodologi Sejarah*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Ilmi Albadiyah, *Puro Pakualaman Selayang Pandang*, Yogyakarta: DEPDIKBUD, 1984.
- Johan Makmur, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*, Jakarta: DEPDIKBUD, 1993.
- Kementrian Penerangan RI, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Kementrian Penerangan RI, 1953.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogya: Tiara Wacana, 1994.
- Mestoko, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Menyusun UU No. 02/1989*, Jakarta : INIS, 2004.
- Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- PEMDA DIY, *Kota Jogjakarta 200 tahun (7 Oktober 1956-7 Oktober 1956)*, Kota Praja Jogjakarta, 1956.
- Poerwokoesoemoe Soedarisman, *Kadipaten Pakualaman*, Yogyakarta: Gadjah Mada UP, 1985.
- Said, *Pendidikan Abad ke-20 dengan Latar Belakang Kebudayaan*, Jakarta: Mutiara, 1981.
- Sartono Kartodirjo, *Sejarah Nasional Indonesia V*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.

- _____, *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- _____, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 (dari Emporium Sampai Imperium)*, Jakarta: Gramedia, 1987.
- _____, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*, Jakarta: PT gramedia, 1990.
- Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.
- Soeratman, *Perguruan Swasta*, Yogyakarta: Majelis Persatuan Taman Siswa, 1981.
- Soetedja Bradjanagara, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Yogyakarta: t.p, 1982.
- Sri Sutjianingsih, *Sejarah Pendidikan DIY*, Yogya: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981.
- Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan pendidikan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Sutari Imam Banardib, *Sejarah Pendidikan*, Yogya: Andi Offset, 1955.
- Tauchid Mochammad, *Perguruan Partikelir*, Yogya: Majelis Luhur Persatuan Tamsis, 1955.
- Vitalis Djebras., *Mengapa Sekolah Partikelir?*, Ende: Arnolus, 1963
- Wasty Soemanto, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*, Surabaya: USAHA NASIONAL, 1983
- Wuryanto Abdullah, *Geografi Budaya dalam Wilayah Pembangunan daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: DEPDIKBUD, 1976
- Zahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan*, Padang: Angkasa Raya, 1981

Majalah:

- Karina Supeli, "Jepara: Sekolah Rakyat", *Basis*: Balai Desa balong, 2008, hlm. 54

Kartono, Sastrodirjo, “Sekolah kebangsaan, Sekolah Rakyat Pancasila”, *Basis*, 2009, hlm.41.

Kristianto E, “Pendidikan di Daerah”, *Basis* 1984, hlm.33

Koentjaraningrat, Kumpulan karangan : Ikhtisar Sejarah Pendidikan di Indonesia dan Perubahan Orientasi Nilai Budaya Indonesia, 1982, hlm. 409

Mangan, J, “Pengaruh Sekolah pada masyarakat Tradisional di Indonesia”, *Prisma* 1986, hlm. 09.

Skripsi

Normi Sholikhah, “Perkembangan Sekolah katolik di Yogyakarta (1917-1940)”, *Skripsi*, Yogyakarta : UNY, 2005.

Parinem, “Perkembangan Pendidikan di Adikarto Tahun 1900-1942”, *Skripsi*, Yogyakarta : UNY, 2003.

Sedianto Setio, “Kerabat Pakualaman Dalam Pendidikan 1864-1930”, *Skripsi*, Yogyakarta : UGM, 1983.

Internet

Soeraji, *Kadipaten Pakualaman*, pada [http : // www.google.com/Kadipaten](http://www.google.com/KadipatenPakualaman) Pakualaman. Diakses pada tanggal 19 Februari 2012

Suparman, Kaitan Kebudayaan dengan Pendidikan, pada [http: //www.google.com/Kebudayaan dan Pendidikan](http://www.google.com/Kebudayaan%20dan%20Pendidikan). Diakses pada tanggal 20 Maret 2012